

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Sugiyono (2016:58) dikutip dari jurnal M Rukmana mengatakan bahwa kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan-pengetahuan. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Pada penelitian ini ada beberapa variabel yang akan dipaparkan dalam kajian pustaka, yaitu kemiskinan, rasio gini, pertumbuhan ekonomi, dan IPM. Kajian pustaka akan dipaparkan sebagai berikut:

2.1.1 Ekonomi Pembangunan

Dalam (Subandi,2012) menurut Arsyad ekonomi pembangunan ialah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara yang sedang berkembang. Lalu, mencari cara untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi agar suatu Negara tersebut dapat membangun perekonomiannya lebih cepat lagi.

Dalam buku Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2011) bahwa ilmu ekonomi pembangunan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang upaya mentransformasi perekonomian dari keadaan stagnan ke pertumbuhan, dan dari status penghasilan rendah ke penghasilan tinggi, serta upaya menanggulangi masalah kemiskinan absolut. Dengan demikian, ilmu ekonomi pembangunan bergerak lebih jauh dengan mencakup bahasan tentang persyaratan ekonomi, budaya, dan politik dalam rangka menghasilkan transformasi struktural dan kelembagaan masyarakat secara menyeluruh yang cepat, dalam cara yang paling efisien untuk menghasilkan kemajuan ekonomi bagi sebagian besar penduduk.

Pembangunan ekonomi menurut (Subandi,2012) didefinisikan sebagai suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan / aktifitas ekonomi untuk dapat menaikkan taraf kemakmuran/hidup (pendapatan per kapita) dalam waktu jangka panjang. Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki 2 (dua) sifat yaitu bersifat deskriptif analisis dan bersifat pilihan kebijakan.

Menurut Adam Smith dalam isi teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 (lima) tahapan atau masa, yaitu :

- a) Tahap berburu
- b) Tahap beternak
- c) Tahap bercocok tanam
- d) Tahap berdagang
- e) Tahap industrialisasi

Menurut Adam Smith masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis, dimana dalam proses pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Menurut pandangannya bahwa bekerja merupakan salah satu input bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik tengah pembahasan dalam teori ini, dalam upaya meningkatkan produktivitas labour (tenaga kerja).

Faktor produksi modal serta pemilih modal (kapitalis) merupakan tahap pembangunan yang ditekankan oleh Adam Smith, karena menurutnya bahwa pemilik modal dapat mengakumulasikan modalnya yang diperoleh dari keuntungan usaha dan tabungan masyarakat yang akan dijadikan tambahan produksi selanjutnya serta dapat menginvestasikan ke sektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan pendapatannya.

Spesialisasi akan terjadi pada tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalis, dimana dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup di masyarakat, diharuskan para pelaku ekonomi untuk tidak melakukan pekerjaan sendiri atau mandiri, akan tetapi lebih baik ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluti bidang tertentu.

Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara menyeluruh dan memiliki keterkaitan hubungan 1 (satu) dengan yang lain. Tumbuhnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi para pemupuk modal, meningkatkan kemajuan teknologi dan spesialisasi, serta

memperluas pasar. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

Mengutip dalam buku (Akhmad Mahyudi,2004) bahwa menurut teori Arthur Lewis pembangunan ekonomi itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian industri.

Adapun tahap-tahap pembangunan menurut W.W. Rostow (1933). Beliau mengatakan bahwa suatu proses pembangunan dalam masyarakat tumbuh bergerak lurus, dari masyarakat terbelakang sampai ke masyarakat yang jauh lebih maju. Proses pertumbuhan Rostow mengalami fase yang cukup panjang yaitu sebagai berikut :

1) Tahap masyarakat tradisional

Tahapan masyarakat tradisional, dimana pada tahapan ini masyarakat masih dipengaruhi sistem kepercayaan tentang kekuatan di luar manusia. Sifat masyarakat ini cenderung statis. Statis dalam arti masyarakat mengalami perkembangan yang cukup lamban. Prakondisi lepas landas, kondisi masyarakat tradisional yang terus bergerak pada suatu titik untuk menuju kondisi prakondisi lepas landas. Kondisi ini terjadi akibat dari faktor luar bukan dari faktor internal. Campur tangan dari luar ini memulai perkembangan untuk memunculkan gagasan-gagasan dalam perkembangan.

2) Tahap prasyarat lepas landas

Lepas landas, pada tahap ini kondisi masyarakat mulai menghilangkan tandatanda dan hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tahapan ini masyarakat mulai mengenal investasi, tabungan dari pendapatan nasional. Munculnya usaha komersial untuk mencari keuntungan bukan lagi sekedar untuk memenuhi konsumsi. Dalam proses ini peningkatan pertanian dianggap penting dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi yang terjadi membutuhkan hasil pertanian sesuai kebutuhan. Tahap pada prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak, yaitu :

a. Pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh Negaranegara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada.

b. Kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh Negara-negara yang born free (menurut Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, di mana Negara-negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional.

3) Tahap Tinggal Landas

Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat

pendapatan per kapita semakin besar. Rostow mengemukakan 3 ciri utama dan negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu:

a. Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari Produk Nasional Bersih (Net National Product= NNP).

b. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi atau *leading sectors* yaitu sektor basis yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

4) Tahap Menuju Kedewasaan

Tahapan ini setelah masyarakat mengalami fase lepas landas muncul perkembangan industrialisasi yang besar. Perkembangan industri ini bukan hanya barang konsumsi tetapi juga barang modal. Jaman konsumsi massal yang tinggi, zaman perkembangan ini masyarakat mengalami kenaikan pendapatan. Sehingga, yang terjadi konsumsi untuk kebutuhan bukan hanya berpusat pada kebutuhan pokok namun pada konsumsi kebutuhan yang tahan lama. Pada tahapan ini, pembangunan yang terjadi mengalami kesinambungan secara terus menerus. Teori ini berdasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kondisi pada teori Rostow ini berbicara mengenai aspek ekonomi yang saling berkaitan.

5) Tahap Konsumsi Tinggi

Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi. Pada tahap konsumsi tinggi ini ada tiga macam tujuan dari masyarakat (Negara), yaitu :

a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.

b. Menciptakan sistem ekonomi Negara kesejahteraan atau *welfare state* dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif.

c. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

2.1.2 Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primer konsumsi makanan dan bukan makanan yang juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan Menurut (Niemi,2011) dalam (Maipita,2014), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan untuk membeli

bahan dan barang-barang kebutuhan primer/dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan papan.

Ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup yang minimum merupakan pengertian kemiskinan menurut Kuncoro pada tahun 2000 dalam Tyas 2016. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana masyarakat atau individu di suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan utamanya serta tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak.

2.1.2.2 Teori Kemiskinan

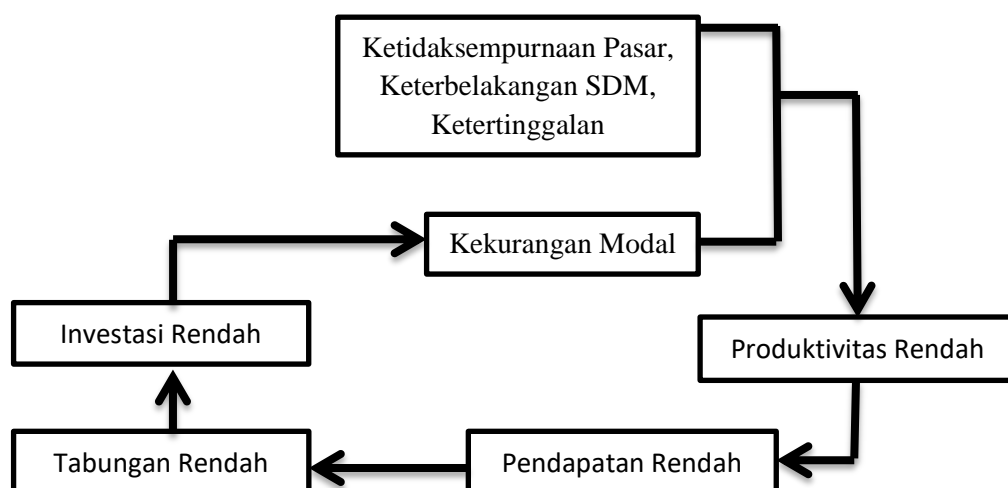
Sharp, et al pada tahun 1996 dalam Mudrajat Kuncoro tahun 1997 mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya dapat memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah sedangkan penduduk yang diatas rata-rata memiliki sumber daya yang cukup besar dan kualitasnya baik.

Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia yang rendah artinya produktivitasnya juga rendah, yang menyebabkan upah yang didapatkan rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, dan adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Permodalan antara orang miskin dan tidak miskin itu sangat timpang karena yang miskin hanya

memiliki modal yang kecil, sedangkan yang tidak miskin memiliki modal yang cukup dan besar untuk membuat suatu usaha perekonomian.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*). Teori lingkaran setan kemiskinan ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Ragnar Nurkse pada tahun 1953, dan mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” yang artinya Negara miskin itu miskin karena dia miskin. Nurkse (Kuncoro,2006) mengatakan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya produktivitas. Lalu akibat dari rendahnya produktivitas akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berpengaruh terhadap aspek tabungan dan investasi. Rendahnya investasi dapat berakibat pada keterbelakangan.

Berikut dibawah ini adalah gambar lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) :



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious circle of poverty*)

Sumber : Nurkse dalam (Mudrajad Kuncoro,1997)

Kemiskinan muncul karena ada ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya dan menimbulkan ketimpangan pendapatan, penduduk yang miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas serta memiliki kualitas yang rendah. Lalu, kemiskinan timbul karena adanya perbedaan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Kualitas SDM yang rendah disebabkan oleh rendahnya pendidikan, diskriminasi, keturunan dan nasib yang kurang beruntung. Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan sumber daya manusia, dan ketertinggalan menimbulkan produktivitas rendah, lalu produktivitas yang rendah akan menimbulkan pendapatan yang rendah, sehingga akses untuk menabung akan melemah/turun dan pendapatannya tidak dapat untuk berinvestasi maka investasinya juga rendah dan berakibat pada rendahnya modal. Rendahnya modal dapat menyebabkan ketidaksempurnaan pasar dan terjadinya keterbelakangan. Hal tersebut terus bergerak melingkar di siklus lingkaran setan kemiskinan.

Thorbecke berpendapat bahwa di wilayah perkotaan kemiskinan akan lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan pedesaan karena, apabila mengalami krisis akan cenderung memberikan pengaruh buruk kepada sektor-sektor perekonomian yang utama di wilayah perkotaan, seperti perdagangan, konstruksi dan perbankan, hal ini dapat menyebabkan hal yang negatif terhadap pengangguran di perkotaan, lalu jika dibandingkan dengan penduduk pedesaan yaitu mereka dapat memenuhi tingkat kebutuhannya dari produksinya sendiri, dengan mengonsumsi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan sayuran.

Mengutip dari jurnal (Agung,2007) bahwa teori Malthus mengatakan “suatu saat pertumbuhan jumlah penduduk akan melebihi persediaan bahan

makanan". Oleh karena itu jika keadaan ini terjadi maka dapat menyebabkan jumlah bahan makanan menjadi minim. Masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah tidak akan mampu untuk mendapatkan bahan makanan tersebut dan akan menjadi miskin.

2.1.2.3 Ukuran Kemiskinan

Mengutip dari jurnal Ari pada tahun 2010 bahwa pada umumnya terdapat 2 indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Menurut (Tambunan,2001) mengatakan bahwa kemiskinan absolut merupakan ukuran kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan, lalu sedangkan kemiskinan relatif ialah sebuah ukuran kemiskinan yang tidak mengacu pada garis kemiskinan.

Kemiskinan absolut adalah kondisi seseorang terhadap penghasilan yang didapatkan lebih rendah dari standar hidup yang layak untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan dalam kebutuhannya sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kedalam kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut ini juga digunakan oleh World Bank dalam menentukan seberapa besar jumlah penduduk miskin di suatu negara. Lalu world bank mengatakan bahwa penduduk miskin merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US \$1/hari PPP (*Purchasing Power Parity*). Dapat dikatakan bahwa tidak semua negara mengikuti standar world bank, karena

menurut kriteria di negara berkembang, standar world bank tersebut terlalu tinggi, sehingga kebanyakan negara dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan standar nasionalnya sendiri sesuai dengan kondisi ekonomi di negaranya masing-masing.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia dalam menentukan kemiskinan absolut ialah seseorang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar minimum energi kalori (2.100kg kalori per kapita perhari) yang digunakan dalam tubuh serta kebutuhan pokok untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan pokok lainnya.

2.1.2.4 Rumus Persentase Penduduk Miskin

Adapun rumus penghitungan persentase penduduk miskin menurut BPS Indonesia

Rumus Penghitungan persentase penduduk miskin :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

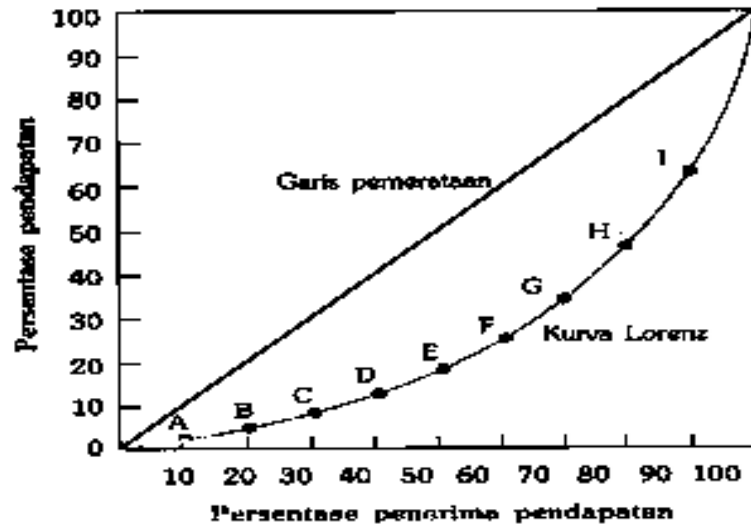
Dimana $\alpha = 0$; z = garis kemiskinan; y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$; q =Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; n = jumlah penduduk.

2.1.3 Rasio Gini

Menurut Smith dan Todaro (2006) dalam jurnal Muchlisin Riadi (2020) bahwa ketimpangan pendapatan merupakan adanya perbedaan penghasilan atau pendapatan yang diterima di suatu wilayah oleh masyarakat sehingga menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Menurut Baldwin (1986), ketimpangan pendapatan adalah adanya perbedaan kemakmuran ekonomi antara orang kaya dengan orang yang miskin, serta dilihat dari perbedaan pendapatan dari keduanya. Dapat disimpulkan dari beberapa para ahli, bahwa ketimpangan pendapatan adalah suatu perbedaan pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh suatu masyarakat antara kelompok yang menerima pendapatan rendah dan kelompok masyarakat yang menerima pendapatan tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Rasio Gini (RG) adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Rasio gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Semakin kurva lorenz melengkung ke bagian bawah sumbu horizontal maka semakin parah tingkat ketimpangan, hal ini dapat dilihat dari kurva lorenz dibawah ini :



gambar 2.2 kurva lorenz

Koefisien gini berkisar antara 0 dan 1. Indeks sebesar 0 yaitu pemerataan sempurna artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya, lalu jika indeks sebesar 1 artinya ketimpangan sempurna atau pendapatannya hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja (Todaro dan Smith,2006).

Menurut Todaro (2003) ada kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan rasio gini, yaitu : 1. $< 0,35$ tingkat ketimpangan rendah; 2. Antara $0,35 - 0,5$ tingkat ketimpangan sedang; 3. $> 0,5$ tingkat ketimpangan tinggi.

Menurut Todaro dan Smith (2006) dalam Khoirun Nisa, Ayu Wulandari, & Rini Luciani Rahayu (2020) bahwa dominan dari keluarga miskin merupakan jumlah anggota keluarga yang banyak maka dari itu, suatu kondisi perekonomiannya yang ada di GK (Garis Kemiskinan) semakin memburuk seiring dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Menurut Sugiyarto et al (2015) mengatakan bahwa hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan sebagai

hubungan yang pragmatis. Pragmatis artinya bahwa ketimpangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau ketimpangan adalah bentuk dari kemiskinan.

Rumus penghitungan rasio gini :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$$

Dimana :

GR = Koefisien Gini

f_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke
(i-1)

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Untuk mengukur keberhasilannya mengacu pada kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang, dari waktu ke waktu, kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat (Sadono Sukirno, 2005).

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Subandi (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus-menerus memungkinkan negara-negara industri maju memberikan segala sesuatu yang lebih kepada warga negaranya, sumberdaya yang lebih banyak untuk perawatan kesehatan dan pengendalian polusi, pendidikan universal untuk anak-anak, dan pensiun publik.

Menurut Sukirno (2004), Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Menurut Jhingan 2004 Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

Menurut tokoh ekonomi klasik dalam Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam sistem produksi suatu negara, yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.

2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.

3. Luas tanah yang dapat dipergunakan dalam proses produksi.

4. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional ini mengarah ke Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warganegaranya dan milik penduduk di negara-negara lain. Biasanya dinilai menurut harga pasar dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku dan harga tetap.

Rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi } t = \frac{PDRB Riil_t - PDRB Riil_{t-1}}{PDRB Riil_{t-1}}$$

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 1990 IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Menurut (Tulus,2003:167) dalam jurnal Syaifullah dan Tia (2016) bahwa IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni perkembangan manusia. Komponen-komponen dasar yang dilakukan untuk penghitungan IPM menurut UNDP, yaitu (a) angka harapan hidup atau lama nya hidup seseorang dan hidup sehat yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, (b) angka melek huruf serta rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, lalu yang terakhir (c) kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran masyarakat per kapita.

Menurut Kurnia Lismawati (2007) dalam jurnal Syaifullah dan Tia (2016) bahwa IPM yang merupakan tolak ukur pembangunan suatu wilayah seharusnya memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan di wilayah tersebut karena dapat diharapkan suatu wilayah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dengan perkataan lain bahwa jika nilai IPM tinggi, maka tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah.

Pada tahun 2014 Indonesia mulai menggunakan penghitungan IPM dengan metode baru. Lalu, indikator yang digunakan sama dengan UNDP terkecuali PNB per kapita. Menurut BPS bahwa untuk menjaga kesinambungan perhitungan, IPM

metode baru dihitung dari tahun 2010 dan dihitung pada tingkat kabupaten/kota.

Indikator lama yang diganti dengan yang baru yaitu:

(a) Angka Melek Huruf (AMH) diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

(b) Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

(c) Metode penghitungan lama rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik.

Menurut BPS keunggulan menggunakan metode baru IPM adalah dapat memperoleh suatu gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan serta perubahan yang terjadi, lalu dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah dan metode penghitungan baru rata-rata geometrik juga lebih adil dalam proses menghasilkan pembangunan manusia yang baik, 3 komponen dalam perhitungan IPM harus memiliki perhatian yangimbang karena sama pentingnya.

Dimensi Kesehatan :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Rumus perhitungan IPM metode baru :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Menurut BPS (2004) bahwa capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu :

Tabel 2.1 Klasifikasi capaian IPM

| Klasifikasi | Capaian IPM |
|---------------|---------------|
| Sangat Tinggi | IPM ≥ 80 |
| Tinggi | 70 ≤ IPM < 80 |
| Sedang | 60 ≤ IPM < 70 |
| Rendah | IPM < 60 |

IPM yang semakin tinggi dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di suatu wilayah tersebut semakin baik, dan berkorelasi positif antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi karena bagian perhitungan IPM ini merupakan komponen-komponen dalam pertumbuhan ekonomi, jika nilai komponen seperti indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran/daya beli masyarakat itu besar, maka pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat.

2.1.6 Penelitian terdahulu

Sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini berikut disajikan beberapa hasil penelitian dari penelitian terdahulu sebagai berikut :

Gambar tabel 2.2 penelitian terdahulu

| No. | Nama, Tahun, dan Judul Penelitian | Persamaan Penelitian dengan Penulis | Perbedaan Penelitian dengan Penulis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|---|
| 1 | Safuridar : 2017 “ Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten Aceh Timur ” | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : Pertumbuhan ekonomi. • Variabel Terikat : Jumlah penduduk miskin. | <ul style="list-style-type: none"> • Regresi menggunakan regresi linier sederhana. • Tidak terdapat variabel bebas : Rasio gini, IPM, rasio jumlah penduduk. | Pada tingkat signifikansi 5% bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten aceh timur. |
| 2 | Lulu Indah Utami, Nurfahmiyati,SE.,M.Si, dan Ria Haryatiningsih,SE.,MT : 2017 “ Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Bebas : IPM dan Pertumbuhan Penduduk. • Variabel Terikat : Kemiskinan. | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel bebas : Rasio Gini • Pengujian asumsi klasik | <ul style="list-style-type: none"> • Pada tingkat signifikansi 5% Pertumbuhan penduduk memberikan pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. • Pada tingkat signifikansi LPE memberikan |

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| | Wilayah Jawa Barat Tahun 2011-2014” | | | pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan, 3. Pada tingkat signifikansi IPM tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan |
| 3 | Pradeep Agraweeel : 2008 “ Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhstan ” | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : Rasio gini & Pertumbuhan Ekonomi • Variabel terikat : Kemiskinan • Regresi linear berganda • Uji R² | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : PDRB, IPM dan Jumlah Penduduk • Pengujian asumsi klasik | <ul style="list-style-type: none"> • Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat upah riil, berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. • Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan kemiskinan, sedangkan ketimpangan memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Yoghi Citra Pratama : 2014 “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : IPM • Variabel terikat : Tingkat kemiskinan • Uji R² • Uji t • Uji f | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada variabel bebas : Rasio Gini, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi • Regresi linear • Asumsi klasik | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel pendapatan perkapita, inflasi, tingkat pendidikan indeks pembangunan manusia (IPM) dan konsumsi secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan. • Hanya tingkat konsumsi dan IPM yang mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif dan signifikan dan variabel lainnya memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan |
| 5 | Dwi Atmojo : 2017 “ Analisis pengaruh rasio gini, IPM, jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : Rasio gini, IPM dan Jumlah Penduduk • Variabel terikat : Tingkat kemiskinan • Uji Regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan pengujian statistik | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : Pertumbuhan Ekonomi | Secara simultan gini ratio dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa |

| | | | | |
|----------|---|---|--|--|
| | Jawa Barat tahun 2012-2016”. | | | Barat, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat. |
| 6 | Hastina Febriaty, Nurwani : 2017 “ Pengaruh rasio gini, PDRB perkapita dan tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sumatera utara ” | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : Rasio Gini • Variabel Terikat : Kemiskinan • Uji T • Uji F • Uji R square • Uji Multikolinearitas | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : PDRB, Jumlah Penduduk, IPM | <ul style="list-style-type: none"> • Pada tingkat signifikansi 5% Rasio gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sumatera utara. • PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. • Inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. |
| 7 | Khoirunisa, Ayu, dan Rini : 2020 ” Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : Rasio Gini • Variabel Terikat : jumlah penduduk miskin • Uji t • Uji R square | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : IPM, Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Penduduk • Uji regresi linier sederhana | Pada tingkat signifikansi 5% bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | kemiskinan di provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2009-2018” | | | terhadap kemiskinan di provinsi kepulauan bangka belitung. |
| 8 | Ambok Pangiuk : 2018 “Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di provinsi jambi tahun 2009-2013” | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : Pertumbuhan ekonomi • Variabel terikat : kemiskinan • Uji T | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : IPM, jumlah penduduk, rasio gini • Analisis regresi linier sederhana | Pada tingkat signifikansi 5% bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di provinsi jambi. |
| 9 | R bambang budhijana : 2019 ” Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2017” | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : IPM dan Pertumbuhan Ekonomi • Variabel terikat :kemiskinan • Regresi linier berganda | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : jumlah penduduk, rasio gini | <ul style="list-style-type: none"> • Pada tingkat signifikansi 5% pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2000-2017 • Pada tingkat signifikansi 5% bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | | | Indonesia. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. |
| 10 | Azzam Ahmad Ali Akbar : 2019 “Pengaruh dana ZIS, PDRB, IPM dan gini ratio terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2012-2016” | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas : IPM dan rasio gini • Variabel terikat : tingkat kemiskinan • Regresi linier berganda • Uji T • Uji F | • | • |

2.1.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu menyatakan bahwa rasio gini, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan rasio jumlah penduduk mempengaruhi kemiskinan.

Rasio gini atau ketimpangan pendapatan memperlihatkan kondisi perbedaan penerimaan per kapita setiap masyarakat atau perbedaan antara pendapatan yang tinggi dan pendapatan yang rendah. Semakin tinggi angka rasio gini, maka akan semakin timpang, hal ini sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan karena yang berpendapatan tinggi dapat menabung, berinvestasi, dan menambah kapasitas modal. Sedangkan masyarakat yang berpendapatan rendah hanya untuk mencukupi kebutuhan primernya.

Menurut Todaro dan Smith (2006: 232) dalam Martiyan “tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan dalam proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kemiskinan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan kapasitas produksinya yang berarti dapat meningkatkan upah dan mengurangi pengangguran, sehingga kemiskinan di setiap daerah provinsi di Indonesia dapat

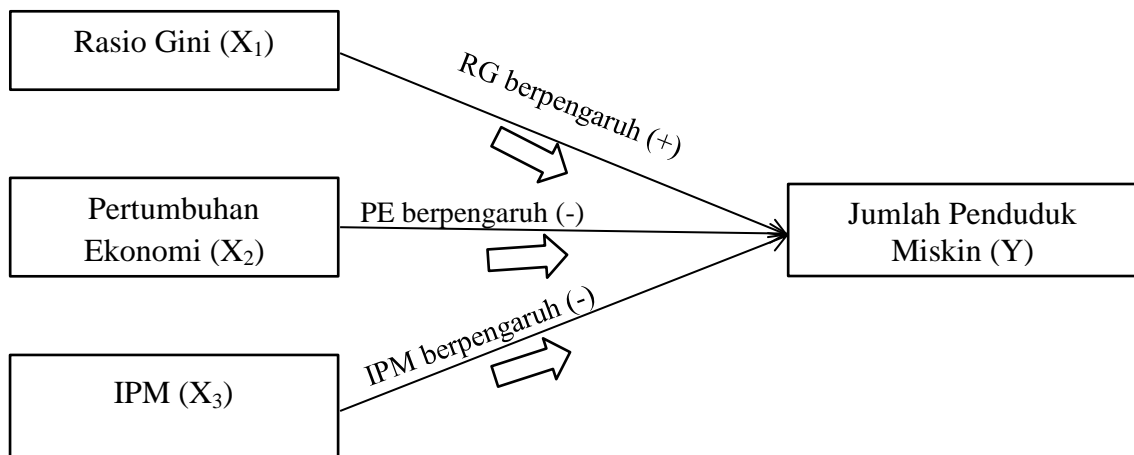
berkurang jika memang pertumbuhannya positif dan efektif, di daerah kabupaten/kota provinsi Indonesia pertumbuhan ekonominya cenderung tidak merata yang berarti ada kesalahan atau pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak efektif dikarenakan SDM yang masih kurang maksimal. Menurut (Siregar & Wahyuniarti, 2008) bahwa pertumbuhan ekonomi itu ialah indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan serta syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ini dapat menyebar luas golongan masyarakat, termasuk kalangan masyarakat miskin.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia), indeks ini untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, ketika angka IPM nya tinggi maka jumlah masyarakat miskin akan turun, hal ini disebabkan karena indeks ini dihitung melalui indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran.

Semakin tingginya ketiga indeks tersebut tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena mempunyai kualitas SDM yang baik dan semakin baiknya kualitas SDM maka akan meningkatkan produktivitas, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Di Indonesia angka IPM di setiap provinsi belum merata, yang mengakibatkan ketimpangan dan menyebabkan kemiskinan yang semakin bertambah. Menurut Subandi pada tahun 2012 mengatakan bahwa “pembangunan dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu upaya dalam memberantas kemiskinan”.

Garis besar dari kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

➤ **Kerangka Pemikiran**



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.1.8 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio gini diduga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.